



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta 10340 – INDONESIA
Email : humas@kemenkopangan.go.id

SIARAN PERS

No. 05/SES.M.PANGAN.4/SP/12/2024

Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2025: Upaya Menjamin Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional

Jakarta, 23 Desember 2024 – Pemerintah telah menetapkan langkah strategis terkait pengelolaan Cadangan Pangan Nasional tahun 2025. Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Perwakilan Menteri Pertanian, perwakilan Menteri Perdagangan, perwakilan Menteri Keuangan, dan perwakilan Menteri Perindustrian, serta Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga dan keamanan pasokan pangan nasional.

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, dalam rakortas dibahas jumlah minimal cadangan pangan pada 13 komoditas utama, yaitu : Beras, Jagung, Kedelai, Gula, Daging Unggas, Daging Sapi, Daging Kerbau, Telur, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai, Minyak Goreng, Ikan. Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dilakukan dengan mempertimbangkan: 1) produksi pangan pokok tertentu secara nasional, 2) penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan, 3) pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen, 4) pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan pangan kerja sama internasional, dan 5) angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

Penetapan CPP untuk masing-masing komoditas selanjutnya akan diusulkan untuk ditetapkan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden.

Menjawab pertanyaan awak media pada sesi konferensi pers, Menko Pangan Zulkifli Hasan memberikan klarifikasi mengenai simpang siur PPN 12% yang dikenakan pada komoditas beras. "Karena presiden kita jelas keberpihakannya kepada masyarakat menengah bawah, maka dikenakan PPN itu hanya untuk barang-barang yang mewah saja. Termasuk soal beras, ini yang ramai, itu perlu saya jelaskan," ujar Zulkifli Hasan. Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan beras premium dan beras medium tidak dikenakan PPN 12% (PPN 0%). Terkait komoditas beras, PPN 12% hanya dikenakan pada beras khusus impor.

Penegasan ini sekaligus menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil dan upaya memastikan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat. ***

Narahubung.

Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi

Devid.Y. Muhammad

081288119482

Narahubung.
Kepala Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi
Devid.Y. Muhammad
081288119482